

## **Pengawas Sekolah Dapat Motor Operasional Anggarkan 34 Unit, Disdik: Mobilitas Mereka Tinggi**



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Kamis, 01/2/2024*

**BONTANG** – Para pengawas sekolah tahun ini bakal mendapat kendaraan roda dua dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Jumlahnya ada 34 unit yang dibagi kepada pengawas TK, SD, dan SMP.

Pengadaan ini diperlukan karena pengawas sekolah memiliki mobilitas tinggi. Dalam pendampingan terhadap sekolah. Sebelumnya, jumlah pengawas hanya dua orang. Pada 2022 terdapat banyak pengangkatan pengawas sekolah. Bantuan ini merupakan fasilitas yang diberikan Pemkot untuk menunjang operasional kinerja.

“Terkait dengan merek motor yang diperoleh, Disdikbud belum menentukan,” terang Kepala Disdikbud Bontang Bambang Cipto Mulyono.

Tiap pengawas harus berkeliling sekolah. Sesuai tugas pendampingan yang diberikan. Selama ini sebagian besar pengawas menggunakan kendaraan pribadi. Mengacu data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)<sup>i</sup>, pagu anggarannya Rp946 juta. “Pengadaannya akan menggunakan skema e-katalog<sup>ii</sup>,” tutur dia.

Sebagai gambaran, dengan pagu anggaran tersebut, ketika dibagi dengan jumlah pengawas, maka bisa membeli motor seharga Rp27 juta per unit. Khusus merek Honda, maka varian yang sepadan adalah Scoopy atau Vario dibanderol Rp26,4 juta. Sementara Scoopy diangka Rp23,9 juta.

Adapun merek Yamaha, ada Fazzio, FreeGo, hingga Lexi. Fazzio di Bontang dibanderol kisaran Rp24-25 juta. FreeGo di angka Rp23,7 juta dan Lexi Rp25,4 juta.

Sementara, pengawas sekolah Siti Jumlah menuturkan, pengangkatan pengawas terjadi pada 2019 silam. Ia memperoleh fasilitas kendaraan roda dua. Tetapi merupakan warisan dari pengawas sebelumnya. “Mereknya Honda Supra X,” ungkapnya.

Ia pun tidak pernah memakainya karena transmisi masih manual. Alhasil kendaraan hanya terparkir di samping rumah. Ketika bertugas, ia memilih menggunakan sepeda motor milik pribadi atau kendaraan roda empat. Menurutnya jika bantuan itu terealisasi, kebutuhan pengawas terjawab.

Selaku pengawas di jenjang SMP, ia mengaku ada 30 satuan pendidikan binaan. Adapun jumlah pengawas jenjang SMP hanya 12. Jadi, ada pembagian menjadi tiga kelompok. Perempuan yang berdomisili di Tanjung Limau ini mengaku untuk medan seperti Bontang Lestari memiliki jarak yang jauh. **(ak/ind/k16)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Pengawas Sekolah Dapat Motor Operasional Anggarkan 34 Unit, Disdik Mobilitas Mereka Tinggi, 01/02/24.

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah (Permendagri 7/2006), kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
2. Diatur dalam Pasal 13 Permendagri 7/2006 bahwa kendaraan dinas meliputi:
  - a. kendaraan perorangan dinas;
  - b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
  - c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
3. Dalam Pasal 15 ayat (1) Permendagri 7/2006 diatur bahwa kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.

---

<sup>i</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

<sup>ii</sup> Dikutip dari <https://latihan-lpse.lkpp.go.id/inaproclat/berita/Aplikasi/E-katalog-LKPP-Tambah-Fitur-Fasilitas--Pelayanan-Info>, e-katalog adalah aplikasi belanja *online* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.